

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni : kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya. Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah. Dalam perkembangan bangsa Indonesia pada Orde Baru berbagai kebijakan seperti sentralisasi diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan sentralisasi yang bersifat top down, semua perencanaan dan keputusan ada pada Pemerintah Pusat, sehingga penerapan sentralisasi akan sulit diterapkan di Indonesia dengan kawasan yang luas, terpisah oleh kepulauan serta berbeda kepentingan. Sebagian daerah akan terabaikan dan selanjutnya akan tertringgal. Gerakan Reformasi sejak tahun 1997 memunculkan tuntutan untuk mengoreksi berbagai kebijakan Pemerintah, termasuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satunya berupa perubahan kebijakan sentralisasi ke desentralisasi (Hamid, 2005).

Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali

revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi (Sidik, 2002). Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya.

Adanya kebijakan desentralisasi, daerah mendapat kesempatan untuk mengelola rumah tangganya sendiri untuk mencapai kemandirian daerah. Dengan wewenang yang dimiliki, pemerintah daerah diharapkan akan mampu mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada di setiap daerah karena pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kondisi, serta apa yang dibutuhkan daerah. Berdasarkan pandangan ini, Pemerintah daerah dipercaya bisa mengalokasikan dana kepada masing-masing sektor dalam ekonomi secara lebih efektif dan efisien dari pada Pemerintah Pusat (Sumarsono dan Utomo, 2009).

Dalam melaksanakan perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah perlu berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat (Haryanto, 2006), sehingga diharapkan tiap tiap daerah Mandiri dalam hal pembiayaan dan seluruh aspek Keuangan Daerah. Tingkat kemandirian Pemerintah daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya dapat diukur dengan rasio PAD terhadap total Pendapatan .

Menurut Halim (2004) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

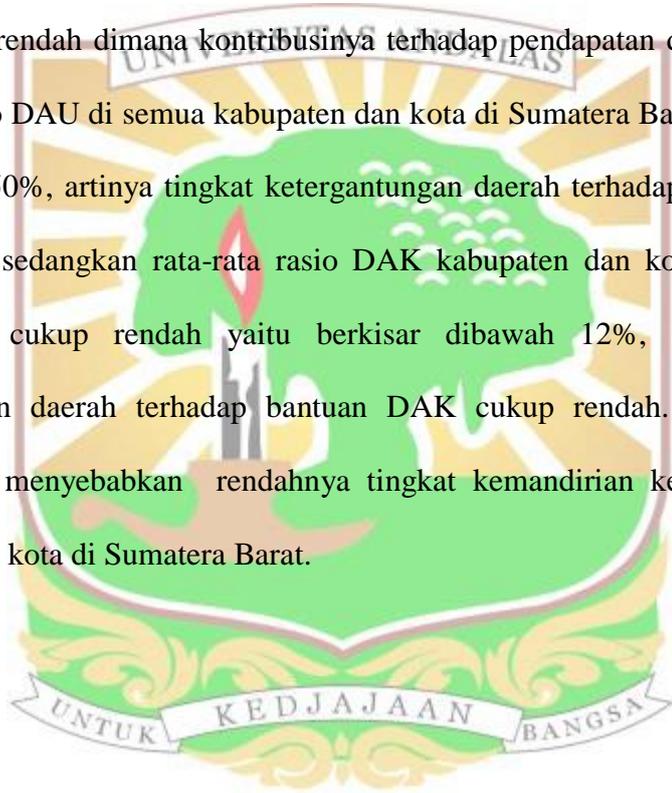
Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Agar terwujudnya kemandirian suatu daerah, Sesuai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Perimbangan ke setiap daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Publik.

Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan menjadi mandiri di dalam pengelolaan keuangan, yang ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah sehingga daerah tidak bergantung kepada pemerintah Pusat maupun Provinsi melalui Dana Perimbangan, Sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi untuk mendukung terciptanya Kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengelola Peningkatan PAD secara tepat dengan mengalokasikan dana tersebut pada jenis belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan Rakyat.

Sumatera Barat termasuk Provinsi yang melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah. Dalam penelitian (Marizkha, reza 2013), yang berjudul “Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011)” ditemukan bahwa, pada tahun 2006 – 2011 rata-rata rasio pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat berada dibawah 10%, dan hanya kota Padang, kota Payakumbuh dan kota Bukittinggi yang mempunyai rata-rata PAD di atas 10%, yaitu masing-masing sebesar 12,40%, 10,17% dan 10,22%. Sementara itu rata-rata rasio DBH di semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih sangat rendah dimana kontribusinya terhadap pendapatan di bawah 10%. Rata-rata rasio DAU di semua kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih tinggi yaitu di atas 50%, artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan DAU masih tinggi, sedangkan rata-rata rasio DAK kabupaten dan kota di Sumatera Barat masih cukup rendah yaitu berkisar dibawah 12%, artinya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan DAK cukup rendah. Fenomena ini kemungkinan menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat.



Di provinsi Sumatera Barat ada lima daerah pemekaran setelah adanya kebijakan Desentralisasi, yaitu daerah :

- Kabupaten Kepulauan Mentawai, pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman (4 Oktober 1999)
- Kota Pariaman, pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman (10 April 2002)
- Kabupaten Pasaman Barat, pemekaran dari Kabupaten Pasaman (18 Desember 2003)
- Kabupaten Dharmasraya, pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (18 Desember 2003)
- Kabupaten Solok Selatan, pemekaran dari Kabupaten Solok (18 Desember 2003)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah pada periode tertentu. Oleh karena itu, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah tapi tidak diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini sangat bertolak belakang pada prinsip-prinsip kemandirian ekonomi. Brata (2004) dalam Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan & Bantuan. Namun demikian, pada penelitian Brata belum mencakup dalam periode setelah otonomi daerah. Jadi dapat disimpulkan, bahwa dengan meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah, maka ini artinya terjadi juga peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan juga dalam hal Kemandirian Keuangan pada daerah tersebut

Sebagai salah satu kabupaten pemekaran yang baru berdiri di Sumatera Barat, tentunya penyerapan Pendapatan Asli Daerah di Solok Selatan belum maksimal, karenanya proporsi dana perimbangan yang diterima di kabupaten Solok Selatan bisa dikatakan lebih besar dari daerah-daerah lain di Sumatera Barat, guna untuk mempercepat pembangunan dan mencukupi belanja daerah karena belum maksimalnya penyerapan pendapatan asli daerah. Tabel berikut menjelaskan persentase dari total Dana Perimbangan kabupaten Solok Selatan tahun 2005-2018.

**Tabel 1.1 Persentase Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Daerah Di Kabupaten Solok Selatan.**

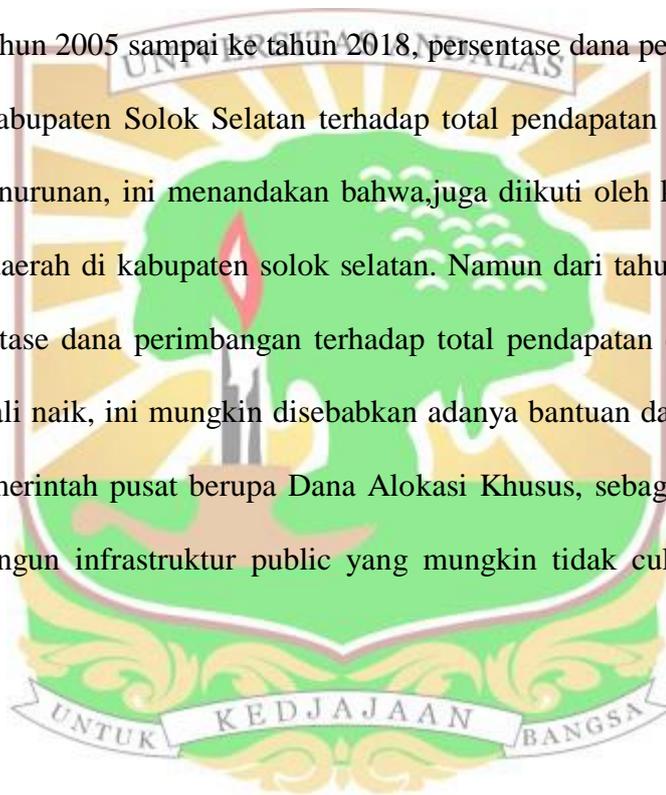
Tahun	Total pendapatan Daerah (Juta Rupiah)	Dana Perimbangan (Juta Rupiah)	Persentase Dana Perimbangan (%)
2005	84488.18	72813.00	86.18
2006	211832.95	199212.00	94.04
2007	270832.95	255366.77	94.29
2008	307748.17	279550.37	90.84
2009	329736.34	299909.45	90.95
2010	342384.00	288545.00	84.28
2011	389286.00	323486.00	83.10
2012	474410.00	376142.00	79.29
2013	538220.00	428491.00	79.61
2014	617240.00	507640.00	82.24
2015	678646.00	542000.00	79.86
2016	824179.00	664918.00	80.68
2017	779105.94	655534.57	84.14
2018	782113.58	646035.95	82.60

*Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan, Data diolah.*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa dari tahun 2005 sampai ke tahun 2018, rata-rata sekitar 85.15 %, dari Total pendapatan Asli daerah kabupaten Solok Selatan disumbangkan oleh Dana Perimbangan atau dana Bantuan dari

pemerintah pusat/Provinsi, Dengan jumlah yang lebih 50% dari total pendapatan daerah yang di pengaruhi oleh dana perimbangan, maka ini akan berpengaruh kepada tingkat kemandirian daerah, karena jika suatu daerah semakin sedikit ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi, maka daerah tersebut akan semakin tinggi tingkat kemandirianya, dan juga sesuai dengan tujuan dari Kebijakan Otonomi daerah, agar daerah daerah tersebut mampu memaksimalkan dari total Pendapatan Asli Daerahnya.

Dari tahun 2005 sampai ke tahun 2018, persentase dana perimbangan yang di dapatkan kabupaten Solok Selatan terhadap total pendapatan daerahnya terus mengalami penurunan, ini menandakan bahwa, juga diikuti oleh kenaikan tingkat kemandirian daerah di kabupaten solok selatan. Namun dari tahun 2013 ke 2014 jumlah persentase dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah di Solok Selatan kembali naik, ini mungkin disebabkan adanya bantuan dana Trasfer yang besar dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus, sebagai bantuan dana untuk membangun infrastruktur public yang mungkin tidak cukup dari APBD daerah.



**Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat, dari Tahun 2010 Sampai 2016.**

Wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sumatera Barat	5.60	6.34	6.31	6.08	5.88	5.52	5.26

(Provinsi)							
Kepulauan Mentawai	5.09	5.28	5.37	5.77	5.57	5.19	5.01
Pesisir Selatan	5.72	5.77	5.82	5.90	5.80	5.73	5.30
Kab.Solok	6.12	4.40	6.43	5.63	5.79	5.43	5.30
Sijunjung	5.57	6.11	6.15	6.14	6.02	5.68	5.25
Tanah Datar	5.87	5.84	5.61	5.85	5.79	5.31	5.01
Padang Pariaman	5.21	5.85	5.94	6.20	6.05	6.13	5.50
Agam	5.46	6.01	6.18	6.15	5.92	5.51	5.40
Lima Puluh Kota	6.24	6.56	6.15	6.23	5.98	5.58	5.31
Pasaman	6.16	5.36	6.01	5.82	5.87	5.33	5.06
Solok Selatan	6.28	4.53	6.04	6.13	5.90	5.35	5.11
Dharmasraya	6.59	6.56	6.19	6.51	6.34	5.75	5.39
Pasaman Barat	6.04	6.33	6.33	6.40	6.04	5.69	5.32
Padang	5.47	6.23	6.16	6.66	6.46	6.39	6.21
Kota Solok	5.96	6.90	6.76	6.44	6.01	5.97	5.75
Sawahlunto	5.14	5.45	5.53	6.11	6.08	6.02	5.71
Padang Panjang	7.54	6.31	5.97	6.29	6.08	5.91	5.79
Bukittinggi	5.60	6.12	6.55	6.28	6.20	6.12	6.04
Payakumbuh	6.32	6.91	6.62	6.56	6.47	6.19	6.08
Pariaman	5.26	5.94	6.13	6.06	5.99	5.78	5.58

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Pada tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi di kabupaten Solok Selatan dari tahun 2010 sampai tahun 2016 mengalami fluktuasi, dan cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2010 ke tahun 2011, dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Solok Selatan turun sebesar 1.75 %, dari 6.28 % ke 4.53%, dan juga pada tahun tahun sesudahnya kembali berfluktuasi dan angkanya cenderung turun.

Sedangkan jika dilihat dari potensi daerah, kabupaten Solok Selatan cukup memiliki potensi daerah yang besar dari berbagai sektor, misalnya dalam sektor perkebunan Teh, Sawit dan Karet yang lahannya cukup besar, belum lagi dari sektor Pertambangan Emas yang juga banyak di hasilkan di kabupaten Solok Selatan. Dari semua potensi daerah yang ada tersebut, jika dimaksimalkan dalam

penyerapan dan pengelolaan Pendapatan Asli daerah, dan dihubungkan dengan tingkat kemandirian dan ketergantungannya terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, tentunya Solok Selatan akan sangat mandiri dengan hasil dari penyerapan PAD dari semua sektor pendapatan yang ada.

Oleh karena alasan yang demikianlah, kenapa penulis tertarik dalam meneliti dan melakukan observasi tentang “ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN (TAHUN 2005 SAMPAI 2018)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian yaitu,

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap kemandirian daerah kabupaten Solok Selatan tahun 2005 – 2018 ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap kemandirian daerah kabupaten Solok Selatan tahun 2005 – 2018 ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kemandirian daerah kabupaten Solok Selatan tahun 2005 – 2018 ?
4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap kemandirian daerah kabupaten Solok Selatan tahun 2005 – 2018 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh seberapa besar pengaruh PAD dari tahun 2005 sampai ke tahun 2018, terhadap kemandirian daerah kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2005 – 2018.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran kepada pemerintah kabupaten Solok Selatan, dalam menyusun kebijakan-kebijakan dalam rangka mewujudkan daerah yang mandiri, dan ekonomi yang stabil, sehingga terciptanya masyarakat yang makmur.

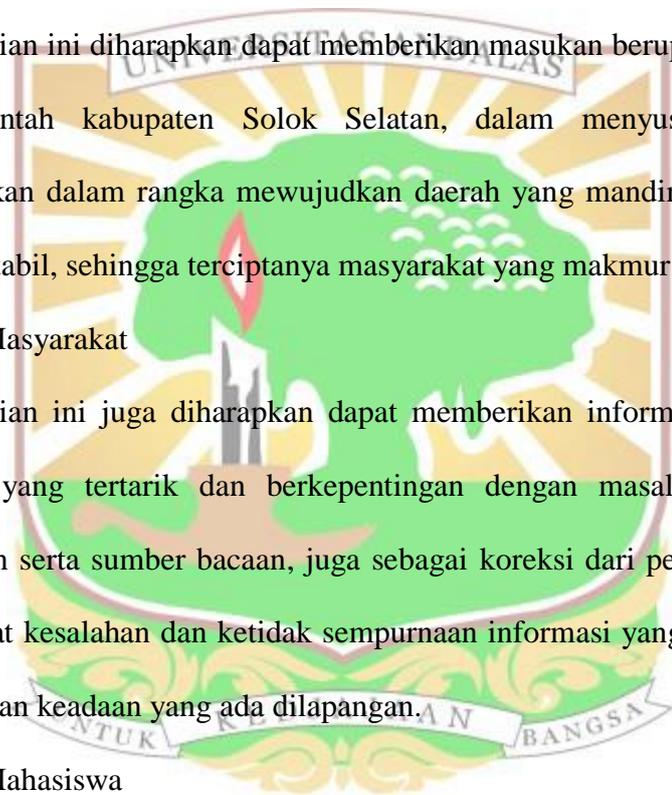
2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah ini sebagai rujukan serta sumber bacaan, juga sebagai koreksi dari penelitian ini jika terdapat kesalahan dan ketidak sempurnaan informasi yang sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada dilapangan.

3. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, penulis berharap jika adanya penelitian lanjutan atau berupa penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan, semoga bisa menjadi rujukan untuk penulisan dan penelitian yang lebih sempurna lagi.

4. Bagi Penulis



Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian suatu daerah, Serta untuk tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian, agar penelitian tersebut dapat terarah sesuai tujuan yang ingin dicapai maka perlu adanya ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 Sampai 2018”. Sesuai dengan judul diatas, peneliti mengambil studi kasus di kabupaten Solok Selatan dengan kurun waktu 2005 sampai 2018. Variabel dependen dari penelitian ini adalah rasio kemandirian daerah, Variabel indenpenden dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Varibel Indenpenden tersebut teradap variabel Dependen.

### **1.6 Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian, Bab V Temuan Empiris dan Implikasi Kebijakan, Bab VI Penutup.

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian. Dari latar belakang yang diuraikan maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah

maka diperoleh tujuan dan manfaat dari penelitian. Pada akhir bab ini akan dijelaskan sistematika penulisan.

**Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut maka di dapat kerangka pemikiran konseptual. Di akhir bab ini terdapat hipotesis penelitian.

**Bab III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang variabel-variabel penelitian dan defenisi operasional, Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, selain itu dalam bab ini juga terdapat ruang lingkup penelitian.

**Bab IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

Pada bab ini akan di uraikan kondisi umum dari daerah penelitan.

**Bab V : TEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

Bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisa data yang telah di teliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa di ambil dalam penelitian ini.

**Bab VI : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan singkat dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.

